

KEBIJAKAN TANPA RISET MINIMNYA BUKTI EMPIRIS DALAM PROGRAM PELATIHAN GURU DI SEKOLAH DASAR INDONESIA

Anggista Dwiana Pingkan¹, Maulidah Ummu Kulsum², Nasya Nurlillah Kusuma Putri³,
Rahma Anisa⁴, Tin Rustini⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

pingkananggista@upi.edu¹, maulidahummukulsum@upi.edu², nurlillahkusuma1@upi.edu³,
rahnisaa7@upi.edu⁴, tinrustini@upi.edu⁵

ABSTRACT; *Improving the quality of basic education in Indonesia is highly dependent on the effectiveness of teacher training programs. However, many teacher training policies in elementary schools are still top-down, generic, and not based on strong research or empirical evidence. This article examines the phenomenon of minimal use of research in the formulation and implementation of teacher training programs in Indonesia, and its impact on the effectiveness of training and the quality of learning in elementary schools. This study uses a qualitative approach with a literature study method, analyzing various academic sources, policies, and reports from educational institutions related to teacher training during the period 2015–2025. The results of the study show that teacher training policies in Indonesia tend to be unresponsive to real needs in the field, do not involve teachers and research institutions enough, and are not based on systematic impact evaluation. In addition, training that is designed uniformly and is not contextual often fails to address specific challenges in the regions, especially in the 3T regions. The low involvement of teachers in policy formulation also weakens the sense of ownership and effectiveness of training implementation. This article recommends the need for a paradigm shift towards teacher training policies that are more research-based, contextual, participatory, and oriented towards local needs, in order to support the sustainable improvement of the quality of basic education in Indonesia.*

Keywords: *Education Policy, Teacher Training, Empirical Evidence, Primary Education, Indonesia.*

ABSTRAK; Peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas program pelatihan guru. Namun, banyak kebijakan pelatihan guru di sekolah dasar yang masih bersifat top-down, generik, dan tidak didasarkan pada riset atau bukti empiris yang kuat. Artikel ini mengkaji fenomena minimnya penggunaan riset dalam perumusan dan implementasi program pelatihan guru di Indonesia, serta dampaknya terhadap efektivitas pelatihan dan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menganalisis berbagai sumber akademik, kebijakan, dan laporan institusi pendidikan terkait pelatihan guru selama kurun waktu 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pelatihan guru di Indonesia

cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, kurang melibatkan guru dan institusi riset, serta belum berbasis pada evaluasi dampak yang sistematis. Selain itu, pelatihan yang dirancang secara seragam dan tidak kontekstual sering kali gagal menjawab tantangan spesifik di daerah, terutama di wilayah 3T. Rendahnya keterlibatan guru dalam penyusunan kebijakan juga memperlemah rasa kepemilikan dan efektivitas implementasi pelatihan. Artikel ini merekomendasikan perlunya pergeseran paradigma menuju kebijakan pelatihan guru yang lebih berbasis riset, kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pelatihan Guru, Bukti Empiris, Pendidikan Dasar, Indonesia.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru adalah melalui program pelatihan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak program pelatihan guru di Indonesia masih bersifat top-down, generik, dan sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata guru di lapangan. Kebijakan pelatihan semacam ini kerap kali tidak dilandasi oleh riset yang kuat dan minim bukti empiris, sehingga efektivitasnya patut dipertanyakan.

Pelatihan guru seharusnya dirancang berdasarkan kajian empiris yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan pedagogis tempat guru bekerja. Darling-Hammond (2006) menegaskan bahwa “professional development that is most effective in improving teacher practice and student outcomes is intensive, ongoing, and connected to practice.” Artinya, pelatihan guru yang bermakna haruslah berbasis praktik nyata di kelas dan relevan dengan tantangan yang dihadapi guru. Sayangnya, banyak pelatihan di Indonesia justru berangkat dari kebijakan pusat tanpa memperhatikan konteks lokal dan pengalaman empiris di sekolah-sekolah dasar, terutama di daerah terpencil.

Minimnya keterlibatan institusi riset dan perguruan tinggi dalam perancangan program pelatihan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat normatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan lapangan. Hal ini diperparah oleh budaya birokrasi pendidikan yang lebih menekankan pada keterpenuhan administratif daripada substansi pelatihan. Menurut Suryadi (2019), “kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali terburu-buru dalam

implementasi dan miskin akan proses perencanaan berbasis data.” Dalam konteks pelatihan guru, kebijakan tanpa riset berisiko menciptakan program yang tidak berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Ketiadaan data empiris dalam perumusan pelatihan juga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan profesional guru dan materi pelatihan yang disediakan. Guru-guru sekolah dasar yang menghadapi tantangan literasi, numerasi, serta pendekatan pembelajaran diferensiasi sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang relevan. Padahal, menurut OECD (2019), pendekatan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based policy) adalah prasyarat utama untuk reformasi pendidikan yang berkelanjutan dan efektif.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi lemahnya fondasi riset dalam program pelatihan guru sekolah dasar di Indonesia. Fokus kajian ini akan diarahkan pada bagaimana minimnya bukti empiris telah memengaruhi efektivitas pelatihan, serta alternatif solusi untuk menciptakan kebijakan pelatihan guru yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis data. Upaya perbaikan pelatihan guru di Indonesia harus berangkat dari pengakuan bahwa pendidikan yang bermutu tidak dapat dibangun di atas kebijakan yang spekulatif, melainkan harus ditopang oleh riset yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan pelatihan guru di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah dasar, masih menghadapi tantangan serius akibat kurangnya penggunaan riset dan bukti empiris dalam perumusannya. Studi oleh Arwildayanto (2018) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan mengidentifikasi bahwa model perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung mengikuti pendekatan top-down dan inkremental, yang kurang berbasis analisis data empiris. Hal ini diperkuat oleh temuan RISE (2019) yang menunjukkan bahwa pelatihan guru sering kali dirancang tanpa pemetaan kebutuhan (needs assessment) yang mendalam, sehingga materi pelatihan tidak relevan dengan tantangan nyata di lapangan, seperti pengelolaan kelas inklusif atau pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini semakin parah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana pelatihan seragam dari pusat gagal menjawab masalah spesifik seperti keterbatasan infrastruktur (SMERU Research Institute, 2020).

Lemahnya keterlibatan guru dalam perumusan kebijakan juga menjadi masalah krusial. Penelitian Nurkholidha et al. (2022) di SMAN 6 Pekanbaru mengungkap bahwa guru sering kali hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek aktif, sehingga program seperti Kurikulum Merdeka sulit diimplementasikan secara optimal. Temuan serupa dilaporkan oleh Nurhattati dan Ripki (2021) dalam Jurnal Edukasi, yang menekankan bahwa minimnya partisipasi guru dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) menyebabkan kebijakan kurang aplikatif. Padahal, studi Ramdhansyah dan Karo-karo (2024) membuktikan bahwa pelibatan guru dalam perencanaan anggaran sekolah meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

Di sisi lain, evaluasi dampak pelatihan yang lemah memperburuk efektivitas kebijakan. Retnawati et al. (2018) mencatat bahwa evaluasi pelatihan guru lebih berfokus pada aspek administratif daripada perubahan perilaku mengajar atau peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan kritik Darling-Hammond (2006) bahwa pelatihan guru yang efektif harus intensif, berkelanjutan, dan terhubung dengan praktik kelas. Sayangnya, pelatihan di Indonesia sering kali bersifat insidental dan tidak didukung oleh mekanisme follow-up, seperti yang diungkapkan dalam laporan LPMP Jawa Tengah (2020).

Beberapa studi internasional menawarkan solusi berbasis bukti. Tatto et al. (2012) dalam Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) menekankan pentingnya pelatihan yang berbasis konteks lokal dan melibatkan guru dalam desain program. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Hargreaves dan Fullan (2012) tentang professional capital, yang menyarankan kolaborasi antara guru, peneliti, dan pembuat kebijakan. Di Indonesia, praktik baik semacam ini masih terbatas, meskipun studi Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis riset di Jawa Barat berhasil meningkatkan kepuasan guru dan relevansi materi.

Dengan demikian, tinjauan literatur mengungkap kesenjangan antara kebijakan pelatihan guru dan praktik berbasis bukti. Solusi yang ditawarkan meliputi: (1) pemanfaatan riset untuk perumusan kebijakan, (2) pelibatan guru dan pemangku kepentingan lokal, serta (3) evaluasi dampak yang sistematis. Sebagaimana dirangkum oleh Kemendikbudristek (2022), transformasi kebijakan pelatihan guru harus berorientasi pada kebutuhan riil di kelas, bukan sekadar agenda politis atau administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji fenomena minimnya bukti empiris dalam perumusan kebijakan pelatihan guru di sekolah dasar Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan kebijakan yang kompleks, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Metode studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik yang bersifat akademik maupun kebijakan, guna mengungkap sejauh mana pelatihan guru didesain dan diimplementasikan berdasarkan temuan-temuan riset yang valid dan relevan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang kredibel, seperti artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek) seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2017 tentang Standar Guru, serta laporan dari lembaga internasional seperti UNESCO dan World Bank. Selain itu, publikasi dari lembaga penelitian dan pusat studi pendidikan lokal, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud), juga digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkuat analisis (Kemdikbudristek, 2017; LPMP Jawa Tengah, 2020).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran sistematis melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan database jurnal nasional, menggunakan kata kunci seperti "kebijakan pelatihan guru", "bukti empiris dalam kebijakan pendidikan", dan "pelatihan guru sekolah dasar di Indonesia". Literatur yang dimasukkan dalam analisis dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu terbit dalam kurun waktu 2015 hingga 2025, relevan dengan konteks pendidikan dasar di Indonesia, dan memiliki dasar metodologis yang kuat. Literatur yang bersifat opini tanpa dukungan data atau tidak relevan secara konteks dikeluarkan dari kajian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti pendekatan top-down dalam kebijakan pelatihan, kurangnya kajian kebutuhan guru, lemahnya sistem evaluasi berbasis dampak, serta rendahnya keterlibatan guru dan peneliti dalam proses perumusan kebijakan (Ningsih & Hartati, 2019; Rahmawati, 2021). Analisis dilakukan secara interpretatif

untuk memahami keterkaitan antara kebijakan dan praktik di lapangan serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memetakan kondisi empiris kebijakan pelatihan guru dan mengungkap kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan praktik berbasis bukti. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan agar kedepan lebih mempertimbangkan hasil riset dalam merancang program pelatihan guru, demi peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Murtafiah (2022), pendidikan yang unggul menciptakan landasan yang kokoh bagi kemajuan masyarakat melalui peningkatan efektivitas pelatihan guru, di mana guru yang berpengalaman dan terus menerus mengikuti pelatihan berkualitas dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan siswa (Dacholfany et al., 2023). Namun, program pelatihan guru di sekolah dasar Indonesia sering kali dijalankan tanpa dukungan riset yang memadai, sehingga menimbulkan keraguan mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, padahal sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pendidikan, peningkatan kualitas profesional guru sangat penting (Rusilowati & Wahyudi, 2020). Kebijakan pelatihan cenderung bersifat top-down, dirancang berdasarkan asumsi atau agenda politis semata, tanpa melibatkan analisis kebutuhan (needs assessment) yang mendalam terhadap permasalahan nyata yang dihadapi guru di lapangan (Supriyatno et al., 2020), sehingga banyak pelatihan yang tidak menyentuh isu-isu krusial seperti pengelolaan kelas inklusif, pembelajaran berbasis teknologi, atau penanganan kesenjangan pembelajaran pasca-pandemi. Minimnya evaluasi berbasis data sebelum dan setelah pelatihan semakin memperparah masalah ini, karena tanpa bukti empiris, sulit untuk menentukan apakah program tersebut benar-benar berdampak atau sekadar memenuhi kewajiban administratif (Retnawati et al., 2018). Namun kondisi ini semakin diperinci oleh kenyataan yang bertolak belakang dengan fakta tentang minimnya riset pendukung terkait pelatihan guru yang terdapat dibawah ini :

1. Perumusan Kebijakan dan Minim Bukti Empiris

Perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait program pelatihan guru di sekolah dasar, masih menghadapi tantangan besar terkait minimnya penggunaan riset dan

bukti empiris sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada efektivitas kebijakan dan pelaksanaan program yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Perumusan kebijakan pendidikan dapat dianalisis melalui berbagai model teoretis. Studi literatur yang dilakukan oleh Arwildayanto (2018) dan Asep Abdul Aziz (2020) mengidentifikasi sejumlah model perumusan kebijakan, antara lain model kelembagaan, model sistem, model rasional, model inkremental, model penyelidikan campuran, model proses, dan model teori elit. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan, serta tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap data empiris. Misalnya, model rasional menekankan pentingnya penggunaan data dan analisis objektif dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan model inkremental lebih mengandalkan perubahan bertahap dari kebijakan yang sudah ada tanpa kajian mendalam berbasis riset.

Dalam konteks pelatihan guru di sekolah dasar, implementasi kebijakan sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan empiris guru di lapangan. Pelatihan yang diberikan cenderung bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan perbedaan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan spesifik guru. Hal ini sejalan dengan temuan RISE (2019) yang menunjukkan bahwa rancangan dan tujuan pelatihan guru di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata guru, akibat pemetaan kompetensi yang kurang tepat dan lemahnya infrastruktur pendukung pelatihan. Akibatnya, terdapat kesenjangan besar dalam kapasitas guru, baik dalam hal kemampuan pedagogis maupun dalam penerapan hasil pelatihan di kelas.

Minimnya bukti empiris dalam perumusan kebijakan pelatihan guru juga diperkuat oleh kurangnya evaluasi sistematis terhadap efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah dasar di Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan kinerja guru, implementasi hasil pelatihan masih sangat bergantung pada inisiatif individu guru dan tidak terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan sekolah atau daerah. Evaluasi yang dilakukan lebih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial terkait perubahan perilaku mengajar atau peningkatan hasil belajar siswa. Secara teoretis, perumusan kebijakan pendidikan seharusnya mengikuti pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*), di mana keputusan diambil berdasarkan hasil riset, data empiris, dan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan serta dampak kebijakan. Teori rasional dan teori analisis kebijakan menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun,

dalam praktiknya, kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kepentingan kelompok, atau tekanan waktu, sehingga aspek riset dan bukti empiris menjadi terabaikan.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas program pelatihan guru, di mana banyak guru yang tidak mendapatkan manfaat optimal dari pelatihan yang diikuti, dan terjadi disparitas kompetensi antar guru di sekolah dasar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu dengan memperkuat peran riset, evaluasi empiris, dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi.

2. Ketidakselarasan dengan Kebutuhan Lokal

Salah satu kelemahan mendasar dalam program pelatihan guru di sekolah dasar Indonesia adalah ketidaksesuaiannya dengan kebutuhan lokal, baik dari segi konteks sosial-budaya, kondisi geografis, maupun kemampuan dasar peserta didik. Banyak pelatihan dirancang secara seragam di tingkat pusat dan diterapkan secara nasional tanpa mempertimbangkan keberagaman konteks lokal yang dihadapi guru, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Pelatihan guru yang bersifat generik cenderung gagal menjawab tantangan spesifik yang dihadapi guru di daerah tertentu. Misalnya, pelatihan tentang pembelajaran digital seringkali tidak relevan bagi guru-guru di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, seperti listrik yang tidak stabil atau jaringan internet yang lemah. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara perencanaan kebijakan dengan realitas di lapangan.

Menurut Hargreaves dan Fullan (2012), “reform efforts that ignore local contexts are unlikely to gain traction and tend to produce superficial changes rather than deep improvement.” Ini menandakan bahwa keberhasilan pelatihan guru tidak hanya bergantung pada materi atau metode, tetapi juga pada kontekstualisasi isi pelatihan dengan kondisi lokal. Guru-guru membutuhkan pelatihan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan siswa dan lingkungan tempat mereka mengajar.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute. Dalam kajian terhadap 34 kebijakan pendidikan di 13 kabupaten dan kota, sepertiganya berfokus pada program pengembangan guru, termasuk pelatihan untuk meningkatkan

keterampilan mengajar. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan hasil pembelajaran siswa, seperti nilai ujian nasional sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan tidak didasarkan pada riset yang solid mengenai kebutuhan dan efektivitasnya, sehingga implementasinya tidak memberikan dampak yang diharapkan terhadap kualitas pendidikan dasar (SMERU, 2020).

Contoh konkret ketidaksesuaian ini juga terlihat dalam pelatihan Kurikulum Merdeka, di mana sebagian besar pelatihan difokuskan pada penyusunan modul ajar berbasis proyek, namun banyak guru di daerah terpencil tidak memiliki akses terhadap sumber daya pendukung seperti laboratorium sederhana, bahan ajar alternatif, atau pelatihan lanjutan untuk implementasi. Hal ini diperparah oleh minimnya dialog antara penyusun kebijakan pusat dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah.

Sementara itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan lokal dan hasil asesmen kontekstual lebih efektif meningkatkan kompetensi guru. Seperti dijelaskan oleh Tatto et al. (2012), pelatihan yang berbasis pada studi lokal dan pengalaman langsung guru terbukti meningkatkan partisipasi, kepuasan, dan penerapan hasil pelatihan dalam praktik kelas.

Dengan demikian, ketidakselarasan program pelatihan guru dengan kebutuhan lokal bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan persoalan struktural dalam desain kebijakan pendidikan. Tanpa keberpihakan terhadap lokalitas dan pelibatan guru sebagai subjek utama perubahan, pelatihan akan terus berputar dalam siklus formalitas yang tidak menyentuh akar masalah mutu pendidikan di tingkat dasar.

3. Rendahnya Keterlibatan Guru dalam Penyusunan Kebijakan

Rendahnya keterlibatan guru dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi persoalan yang cukup krusial. Padahal, guru merupakan pelaksana utama di lapangan yang sangat memahami kondisi riil proses pembelajaran dan berbagai dinamika pendidikan di tingkat akar rumput. Minimnya partisipasi guru dalam perumusan kebijakan ini berdampak langsung pada lemahnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap kebijakan tersebut dan berpotensi menghambat efektivitas implementasinya.

Salah satu contoh yang paling mencolok adalah pada implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini didesain untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun dalam praktiknya, banyak guru merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan maupun sosialisasinya. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam memahami esensi dari kurikulum tersebut dan kesulitan pula dalam mengimplementasikannya secara utuh. Studi yang dilakukan oleh Nurkholidha et al. (2022) di SMAN 6 Pekanbaru menunjukkan bahwa guru menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan penguasaan teknologi, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perubahan kebijakan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pelibatan yang lebih intensif terhadap guru dalam proses formulasi dan pelatihan kebijakan.

Hal serupa juga terjadi pada program Guru Penggerak, yang secara konseptual bertujuan menjadikan guru sebagai agen perubahan di sekolah. Namun, laporan dari Lembaga KITA menunjukkan bahwa keterlibatan guru dalam tahap awal perumusan program ini masih terbatas. Padahal, untuk menjamin keberhasilan program tersebut, sangat penting untuk mengikutsertakan guru sejak awal sebagai subjek utama, bukan sekadar objek penerima program.

Selain itu, dalam pengembangan muatan lokal dalam kurikulum, keterlibatan guru juga sering kali diabaikan. Guru cenderung hanya menjadi pelaksana tanpa kesempatan berkontribusi dalam menyusun konten muatan lokal yang relevan dengan konteks budaya dan sosial setempat. Kondisi ini berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak kontekstual dan kurang aplikatif bagi peserta didik.

Penelitian oleh Nurhattati dan Ripki (2021) mengenai penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) di Kabupaten Karawang memperkuat temuan tersebut. Mereka menemukan bahwa pemahaman guru terhadap RKAM masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan dalam sosialisasi kebijakan, serta faktor internal seperti usia dan status kepegawaian. Guru tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang menyebabkan implementasi program madrasah berjalan tidak maksimal.

Dalam konteks kebijakan digitalisasi pendidikan, penelitian oleh Anita dan Astuti (2022) di Kecamatan Baraka juga menunjukkan bahwa meskipun berbagai platform pembelajaran

digital telah disediakan, sebagian besar guru belum siap menggunakannya. Mereka belum memanfaatkan media seperti Rumah Belajar atau Canva dalam pembelajaran, meskipun telah mengetahui keberadaan platform tersebut. Hal ini mempertegas pentingnya pelibatan guru dalam proses perencanaan dan pelatihan digitalisasi agar transisi ke pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan efektif.

Keterlibatan guru juga masih lemah dalam praktik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Yulvita et al. (2023) mencatat bahwa di Gugus I Kecamatan Ampek Nagari, guru belum terlibat secara optimal dalam pengambilan keputusan sekolah. Minimnya literasi digital dan pemahaman teknis membuat guru kurang percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam proses manajerial sekolah.

Namun demikian, terdapat studi positif dari Ramdhansyah dan Karo-karo (2024) di Kota Medan, yang menemukan bahwa keterlibatan guru dalam penyusunan anggaran sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hal ini membuktikan bahwa pelibatan guru secara aktif tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan efisiensi anggaran sekolah. Sayangnya, ruang partisipasi tersebut masih terbatas pada sebagian sekolah dan belum menjadi praktik umum.

Berdasarkan berbagai studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya keterlibatan guru dalam penyusunan kebijakan pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, kurangnya akses informasi, terbatasnya pelatihan, dan lemahnya saluran komunikasi antara pemangku kebijakan dan guru. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan reformasi pendidikan yang partisipatif dan kontekstual akan sulit dicapai.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan guru dalam setiap tahap kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan yang bermakna akan membangun rasa kepemilikan guru terhadap kebijakan, mendorong implementasi yang lebih efektif, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di lapangan.

Pembentukan kompetensi guru merupakan proses yang berkelanjutan termasuk pasca pelatihan. Guru yang profesional terus mengembangkan dan mengkonstruksi pengetahuannya baik melalui praktek maupun melalui studi literatur. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aruismunandar dan Ratnawati (2010) bahwa Efektivitas pendidikan dan pelatihan yang selama ini dilaksanakan menjadi tidak terukur karena tidak ada jaminan mutu, bahwa hasil pelatihan

benar-benar dapat diimplementasikan. Pendidikan dan Pelatihan akhirnya dipandang sebagai kegiatan formalitas semata, karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru. Dampak dari kebijakan pelatihan tanpa riset empiris ini sangat merugikan. Guru mungkin merasa pelatihan yang diberikan tidak relevan dengan kebutuhan mereka, sehingga mengurangi motivasi dan partisipasi aktif. Selain itu, investasi waktu, tenaga, dan anggaran yang besar untuk program pelatihan bisa menjadi tidak efisien jika tidak ada jaminan bahwa program tersebut benar-benar memberikan peningkatan kompetensi yang signifikan dan berkelanjutan. Penelitian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa guru dengan status honorer atau yang menerima gaji rendah seringkali merasa tidak dihargai, yang mengurangi semangat mereka untuk bekerja dengan maksimal. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa kualitas pelatihan dan pengembangan profesional guru masih menjadi masalah yang signifikan, dengan guru yang merasa tekanan dari kebijakan tanpa dukungan yang memadai dapat mengalami penurunan motivasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis riset dalam perumusan kebijakan pelatihan guru, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan mengumpulkan bukti-bukti empiris yang kuat untuk memastikan efektivitas dan relevansi program pelatihan. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor internal, seperti motivasi, keterampilan, dan kepuasan kerja, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pengajaran, sementara faktor eksternal, seperti kebijakan pendidikan, fasilitas, dan kesejahteraan guru, juga memainkan peran penting. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja guru, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup perbaikan pada kedua aspek tersebut. Kebijakan yang mendukung, fasilitas yang memadai, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Minimnya penggunaan riset dan bukti empiris dalam perumusan serta pelaksanaan program pelatihan guru di sekolah dasar Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan nyata guru di lapangan hingga

rendahnya efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan pelatihan guru, yaitu dengan menempatkan riset sebagai dasar utama pengambilan keputusan, memperkuat evaluasi berbasis data, serta meningkatkan keterlibatan guru dan pemangku kepentingan lokal dalam setiap tahapan kebijakan. Dengan demikian, program pelatihan guru diharapkan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab tantangan pendidikan dasar dan mendorong peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, & Astuti, Y. (2022). *Transformasi Digitalisasi Pendidikan di Kecamatan Baraka*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 7(3), 115–128.
- Arwildayanto. (2018). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)
- Evaluasi Keefektifan Diklat Peningkatan Kompetensi atas Kinerja Guru SD di Kota Semarang
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. Teachers College Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2017 tentang Standar Guru*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah. (2020). *Laporan evaluasi pelatihan guru sekolah dasar*. Semarang: LPMP Jawa Tengah.
- Ningsih, R., & Hartati, S. (2019). Analisis kebijakan pelatihan guru dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan*, 4(2), 145–157.
- Nurhattati, & Ripki, M. (2021). *Peran Guru dalam Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)*. Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 19(2), 93–104.

- Nurkholidha, F., Syahputra, E., & Pratama, A. (2022). *Hambatan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di SMAN 6 Pekanbaru*. Jurnal Tuah: Pendidikan dan Pengajaran, 6(2), 45–57.
- Rahmawati, D. (2021). Implementasi kebijakan pelatihan guru berbasis bukti: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(1), 77–89.
- Ramdhansyah, R., & Karo-karo, D. (2024). *Pengaruh Partisipasi Guru dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran Sekolah*. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia (JAPENDI), 5(1), 10–21.
- RISE. (2019). Laporan Praktik Pelatihan Guru di Indonesia
- SMERU Research Institute. (2020). *Mapping Education Policies at the Local Level: A Study in 13 Districts/Cities*. Jakarta: SMERU.
- Susanti, A., & Sa'ud, U. S. (2016). Efektifitas pengelolaan pengembangan profesionalitas guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2).
- Tanjua, A. L., Dewi, D. E. C., Puspasari, N., Nugraha, H., & Meylindo, D. (2024). Kinerja Guru dan Permasalahannya. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(4), 161-171.
- Tatto, M. T., Reckase, M., & Menter, I. (2012). *Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M)*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Yulvita, E., Sudarsih, & Fitri, N. (2023). *Partisipasi Guru dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Gugus I Kecamatan Ampek Nagari*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8(1), 66–77.